



Determinan Keberlanjutan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung

Siska Amelia^{1*}, Rindu Rika Gamayuni²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: auntysiska@gmail.com

Abstract. *This study discusses the factors that influence the financial sustainability of districts and cities in Lampung Province during the 2017-2023 period. The main phenomenon behind this is the fluctuating and negative trend of financial sustainability since the COVID-19 pandemic, as well as an increase in the number of elderly and children who have the potential to hamper economic growth and regional fiscal capacity. This study aims to analyze the influence of financial independence variables, budget solvency, GRDP per capita, and population dependency ratio on regional financial sustainability. The method used is descriptive quantitative analysis with secondary data from regional financial reports, GRDP, and demographic data from BPS, with a sample of all districts / cities in Lampung totaling 15 regions and the period 2017-2023. The results show that financial independence and budget solvency have a positive and significant effect on financial sustainability, while GRDP per capita and population dependency ratio have no significant effect. The findings suggest that local governments should increase own-source revenues and maintain budget balance to strengthen local financial sustainability in the future.*

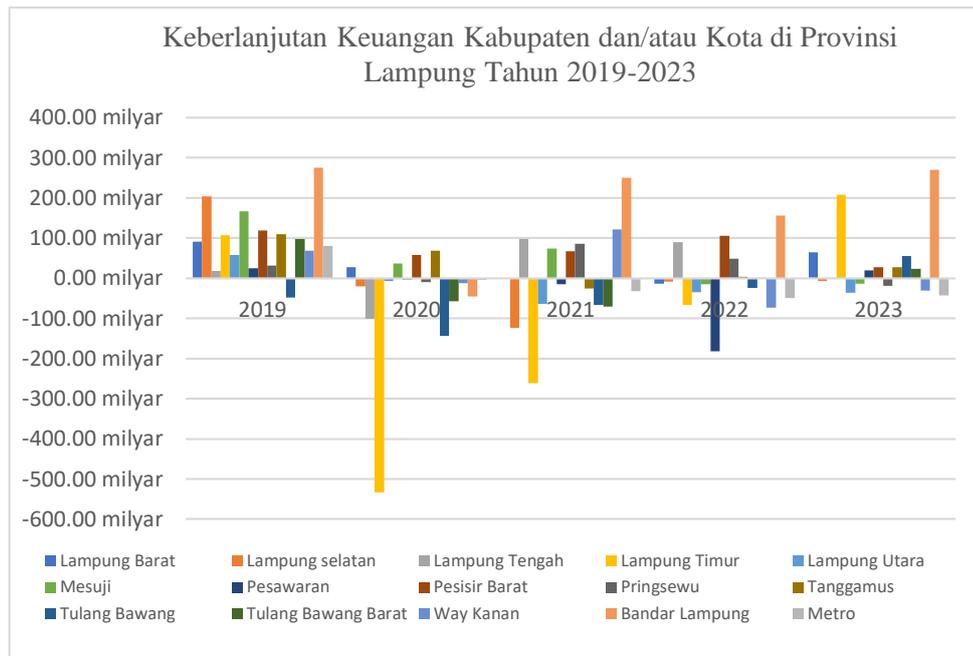
Keywords: *Financial Sustainability, Financial Independence, Budget Solvency, GRDP Per Capita, Dependency Ratio*

Abstrak. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung selama periode 2017-2023. Fenomena utama yang melatarbelakangi adalah tren keberlanjutan keuangan yang fluktuatif dan negatif sejak pandemi COVID-19, serta peningkatan jumlah penduduk usia lanjut dan anak-anak yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel kemandirian keuangan, solvabilitas anggaran, PDRB per kapita, dan rasio ketergantungan penduduk terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari laporan keuangan daerah, PDRB, dan data demografis dari BPS, dengan sampel seluruh kabupaten/kota di Lampung sebanyak 15 daerah dan periode 2017-2023. Hasil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan solvabilitas anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, sedangkan PDRB per kapita dan rasio ketergantungan penduduk tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjaga keseimbangan anggaran guna memperkuat keberlanjutan keuangan daerah di masa mendatang.

Kata Kunci: Keberlanjutan Keuangan, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Anggaran, PDRB Per Kapita, Rasio Ketergantungan Penduduk

1. LATAR BELAKANG

Keberlanjutan keuangan pemerintah daerah merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah tantangan global dan nasional termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Kondisi ini menuntut adanya analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan daerah agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Keberlanjutan keuangan merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang tanpa mengorbankan pelayanan publik atau membebani generasi mendatang (Modugno & Di Carlo, 2019).



Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Gambar 1. Keberlanjutan Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2019-2023.

Berdasarkan gambar 1 keberlanjutan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2017-2023 di Provinsi Lampung memperlihatkan fluktuasi dan pola tertentu yang perlu dianalisis lebih dalam. Selain itu, seiring fenomena bonus demografi masih terus berlangsung, fenomena *aging population* juga meningkat. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Lampung, pada tahun 2022 fenomena *aging population* di Provinsi Lampung sudah mencapai 10% yang berarti bahwa sekitar 1 dari 10 penduduk adalah usia lanjut. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa penduduk usia lanjut meningkat menjadi 11,07%. Hal ini menandakan bahwa penduduk usia lanjut terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya penduduk usia 0-14 tahun yang bisa menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari bonus demografi karena lebih banyak sumber daya digunakan untuk pendidikan bagi anak usia sekolah dan penduduk usia di atas 65 tahun yang sudah tidak bekerja menurunkan tingkat pendapatan daerah. Berdasarkan fenomena ini juga perlu diteliti kaitan antara faktor demografi dengan keberlanjutan keuangan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran kemandirian keuangan, solvabilitas anggaran, serta faktor ekonomi seperti PDRB per kapita dalam menentukan keberlanjutan keuangan daerah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam studi yang mengintegrasikan faktor demografis seperti rasio ketergantungan penduduk dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan keuangan di tingkat regional, khususnya di Provinsi Lampung.

Penelitian Lhutfi & Sugiharti (2023); Wardhani & Payamta (2020) menemukan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Syahriyal dkk (2024); Bolívar et al (2014) menemukan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan. Selain itu, penelitian Santis (2020) menemukan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan.

Penelitian Syahriyal dkk (2024) menemukan bahwa solvabilitas anggaran berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Puron & Garcia (2022) yang menemukan bahwa solvabilitas anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Bolívar et al (2016); menemukan bahwa PDB per kapita tidak mempengaruhi keberlanjutan keuangan.

Penelitian Bolívar et al (2016); Galera et al (2021) menemukan bahwa populasi yang bergantung atau rasio ketergantungan memiliki pengaruh yang negatif terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Santis (2020) menemukan bahwa rasio ketergantungan penduduk tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan variabel keuangan dan demografis yang belum banyak dieksplorasi secara bersamaan dalam konteks Provinsi Lampung. Penelitian ini juga menekankan pentingnya analisis empiris yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal daerah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel kemandirian keuangan, solvabilitas anggaran, PDRB per kapita, dan rasio ketergantungan penduduk terhadap keberlanjutan keuangan daerah di Provinsi Lampung periode 2017-2023. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan daerah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Neo-Institusionalisme

Teori neo-institusionalisme adalah pendekatan yang berpusat pada bagaimana perilaku individu dan organisasi dipengaruhi oleh institusi. Teori neo institusionalisme pertama kali

diperkenalkan oleh Meyer & Rowan tahun 1977 yang menjelaskan ide-ide dasar mengenai bagaimana institusi mempengaruhi tindakan manusia dalam konteks organisasi. Teori ini menekankan bahwa tindakan individu sering kali ditentukan oleh norma-norma institusional yang ada di sekitar mereka. Meyer & Rowan (2011) menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya dibentuk oleh kebutuhan efisiensi atau tujuan teknis, tetapi juga oleh tekanan sosial, politik, dan budaya yang ada di sekitarnya. Powell & DiMaggio (1983) melanjutkan pengembangan teori ini dan memperkenalkan konsep isomorfisme yang menjelaskan bagaimana organisasi cenderung menjadi serupa satu sama lain di bawah tekanan institusional. Ada tiga jenis isomorfisme: koersif, mimetik, dan normatif. Isomorfisme koersif muncul akibat tekanan regulasi atau kekuatan formal, sedangkan isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi meniru praktik-praktik yang dianggap sukses dari organisasi lain. Isomorfisme normatif terjadi karena profesionalisasi dan penyebaran norma melalui jalur pendidikan dan pelatihan profesional.

Keberlanjutan Keuangan

Menurut Modugno & Di Carlo (2019) mendefinisikan keberlanjutan keuangan merupakan kemampuan entitas publik untuk mempertahankan keseimbangan keuangan jangka panjang, menghindari defisit yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan saat ini tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini mencakup beberapa elemen penting, termasuk Efisiensi fiskal, solvabilitas jangka panjang, dan pengelolaan. Menurut Bolívar et al (2018) keberlanjutan keuangan dapat diukur dengan laporan laba rugi yang disesuaikan yang tidak mencakup pendapatan dan pengeluaran luar biasa karena kemungkinan terjadinya di masa depan sangat rendah dan tidak berulang.

Kemandirian Keuangan

Mahmudi (2019) mendefinisikan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri. Menurut Halim (2012) kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian yang menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber keuangan eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Bahl & Richard (2018) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan dalam konteks desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri, dengan mengandalkan sumber daya lokal tanpa bergantung secara signifikan pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat.

Solvabilitas Anggaran

Menurut Ritonga (2014) solvabilitas anggaran adalah kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban operasionalnya. Wang (2007) mendefinisikan solvabilitas anggaran sebagai kemampuan organisasi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai tingkat layanan saat ini. Solvabilitas anggaran mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama periode anggaran fiskal (Nollenberger et al., 2003). Menurut Inman (1995) dalam Cuadrado-Ballesteros et al (2019) mendefinisikan solvabilitas anggaran sebagai kemampuan organisasi sektor publik untuk meningkatkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran yang diwajibkan secara hukum tanpa mengalami defisit.

PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (www.bps.go.id). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran atau kesejahteraan rata-rata penduduk di suatu daerah. Menurut Sukirno (2016), PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total nilai PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduknya, sehingga angka tersebut mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, maka semakin tinggi pula kemampuan ekonomi masyarakat secara umum dan mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang meningkat.

Rasio Ketergantungan Penduduk

Menurut Suwito (2020) rasio ketergantungan merupakan perbandingan yang menggambarkan seberapa besar beban tanggungan penduduk usia produktif. Selain menanggung hidupnya sendiri, penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menanggung kebutuhan hidup penduduk yang nonproduktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun ke atas). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah indikator demografis yang digunakan untuk mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam mendukung kelompok penduduk yang tidak produktif, yaitu anak-anak (0-14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas). Rasio ini menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk yang secara ekonomi tidak aktif dengan kelompok penduduk yang aktif secara ekonomi. Semakin cepat populasi suatu wilayah meningkat, semakin banyak anak yang menjadi tanggungan. Akibatnya, beban usia produktif yang bekerja menjadi lebih sulit untuk membantu mereka yang tidak atau belum bekerja.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Keberlanjutan Keuangan

Kemandirian keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan operasional dan pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari sumber keuangan eksternal. Pemerintah daerah yang mandiri adalah pemerintah yang memiliki pendapatan asli daerah yang substansial. Pendapatan asli daerah dialokasikan untuk Kemandirian keuangan yang lebih tinggi berdampak positif pada persepsi keberlanjutan keuangan di antara pemerintah daerah (Kim, 2018). Sehingga dapat meningkatkan legitimasi masyarakat dan pemerintah pusat. Penelitian oleh Lhutfi & Sugiharti (2023); Wardhani & Payamta (2020) menemukan bahwa kemandirian keuangan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi lebih mampu mengelola keuangan mereka secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya atau potensinya dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu secara berkelanjutan tanpa harus meninggalkan beban atau hutang bagi generasi mendatang.

H1= Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan

Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi belanja publik yang dibiayai oleh pendapatannya. Indikator solvabilitas anggaran digunakan secara luas dalam penilaian keuangan pemerintah daerah di berbagai negara sebagai acuan untuk evaluasi keberlanjutan keuangan daerah (Pina et al., 2020). Solvabilitas anggaran memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan layanan publik (Galera et al., 2016). Solvabilitas anggaran yang baik berkorelasi positif dengan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah karena solvabilitas memungkinkan pengelolaan beban utang dan pengeluaran jangka panjang yang lebih stabil (Bolívar et al., 2014). Solvabilitas anggaran memungkinkan pemerintah daerah menjaga fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi makro (Bisogno et al., 2019). Penelitian terdahulu oleh Syahriyal dkk (2024) dan Cuadrado-Ballesteros et al (2019) menemukan bahwa solvabilitas anggaran berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan. Semakin tinggi solvabilitas anggaran maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah mengelola pengeluaran dari pendapatan.

H2= Solvabilitas anggaran berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Keberlanjutan Keuangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih baik, serta menunjukkan aktivitas ekonomi yang dinamis dan produktif di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan meningkatkan *ability to pay* terhadap pajak daerah seperti pajak restoran, hotel, hiburan, serta retribusi jasa pelayanan publik dan perizinan (Muhammad, 2021). PDRB per kapita yang tinggi juga meningkatkan penerimaan pajak PBB yang pada akhirnya pendapatan asli daerah turut meningkat (Panjaitan et al., 2020). Sesuai teori neo-institusionalisme, peningkatan PDRB dan pendapatan daerah mendorong pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan eksternal, seperti kewajiban menyediakan layanan publik yang lebih baik. Hal ini merupakan bentuk isomorfisme koersif, di mana pemerintah daerah tertekan untuk memenuhi harapan institusional dan mempertahankan keberlanjutan keuangan yang lebih baik.

H3= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan

Pengaruh Rasio Ketergantungan Penduduk Terhadap Keberlanjutan Keuangan

Rasio ketergantungan penduduk atau rasio beban ketergantungan merupakan indikator yang mengukur jumlah penduduk non-produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) dalam suatu daerah. Penduduk non-produktif, seperti anak-anak dan lansia, tidak memberikan kontribusi langsung terhadap aktivitas ekonomi lokal, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan retribusi jasa umum. Dependency ratio secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita yang berarti bahwa peningkatan rasio ketergantungan akan menurunkan pendapatan masyarakat (Lubis & Saputra, 2016). Penurunan pendapatan masyarakat ini akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak daerah, karena kemampuan membayar pajak serta tingkat konsumsi menurun. Akibatnya, penerimaan pajak daerah melemah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menurun. Penelitian terdahulu oleh Santis (2020); Galera et al (2021) menemukan bahwa populasi non produktif yang berusia 0-14 tahun dan usia di atas 65 tahun atau biasa disebut populasi dependen memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan.

H4: Rasio ketergantungan penduduk berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif sebagai metode pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung periode 2017-2023 dari *website* e-PPID BPK serta data PDRB per kapita dan data penduduk dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Lampung sedangkan sampelnya adalah semua kabupaten dan/atau kota di provinsi Lampung pada tahun 2017-2023. Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan teknik sampel jenuh. Setiap anggota populasi diambil sebagai sampel dalam metode sampel jenuh (Sugiyono, 2017). Sehingga semua populasi dalam penelitian ini menjadi sampel penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri 15 Kabupaten dan/ atau Kota di Provinsi Lampung. Dengan periode pengamatan selama tahun 2017-2023, sehingga didapatkan sebanyak 105 data sampel.

Definisi Operasional Variabel

Keberlanjutan Keuangan

Keberlanjutan keuangan merupakan selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional setelah dikurangi pos-pos luar biasa (Bolívar et al., 2018). Keberlanjutan keuangan diukur dengan cara:

$$FS = \text{Surplus Operasional} - \text{Pendapatan Luar Biasa} + \text{Beban Luar Biasa}$$

Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan merupakan Perbandingan jumlah PAD terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi ditambah jumlah pinjaman (Mahmudi, 2019). Kemandirian keuangan diukur dengan cara:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban operasional menggunakan pendapatan (Ritonga, 2014). Solvabilitas anggaran diukur dengan cara:

$$\text{Solvabilitas Anggaran} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$$

PDRB Per Kapita

Menurut Sukirno (2016) PDRB per kapita adalah perbandingan PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita diukur dengan cara:

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHK}}{Penduduk}$$

Rasio Ketergantungan Penduduk

Angka perbandingan golongan usia muda (0 – 14 tahun) dan golongan tua (65 kelompok usia produktif (15-64 tahun) (Suwito, 2020). Rasio ketergantungan penduduk diukur dengan cara:

$$Dependency \text{ Ratio} = \frac{P(0 - 14) + P(65+)}{P(15 - 64)}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data variabel dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Menurut Ghazali (2016) apabila nilai residual tidak mengikuti distribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji *kolmogorov-smirnov* digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan program SPSS v21. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 adalah jika probabilitas $\geq 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika probabilitas $< 0,05$ maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan satu sama lain dalam model tertentu (Ghozali 2016). Gejala multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance (TOL) $< 0,1$ dan ilai variance Inflation Faktor (VIF) > 10 .

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2016) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan dalam model regresi linear antara residu dari periode t dan residu dari periode t-1, atau data yang dipengaruhi oleh data sebelumnya. Salah satu cara untuk menentukan apakah ada masalah dengan autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW)

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan dalam varian dan residual dalam model regresi. Terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji statistik glejser, yaitu jika sig.2-tailed $< \alpha = 0.05$, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika sig.2-tailed $> \alpha = 0.05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (Sutrisno Hadi, 2004:18). Persamaan untuk analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Y: Keberlanjutan Keuangan

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X1 : Kemandirian Keuangan

X2 : Solvabilitas Anggaran

X3 : Produk Domestik Regional Bruto

X4: Rasio Ketergantungan Penduduk

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran seberapa baik sebuah model menjelaskan varians variabel terikat. Ini memiliki dua nilai: nol dan satu. Jika nilai R^2 rendah, kemampuan variabel dependen sangat terbatas.

Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji T) bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh secara parsial pada variabel independen. Metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen adalah

- H_0 diterima apabila signifikansi bernilai $t > 0,05$ yang berarti variabel dependen tidak terpengaruh oleh variabel bebas atau independen.
- H_0 ditolak apabila signifikansi bernilai $t < 0,05$ yang berarti variabel dependen terpengaruh oleh variabel independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Uji *Multiple Regression*

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| KEMANDIRIAN KEUANGAN | 89 | 2,89 | 43,28 | 9,1127 | 7,60974 |
| SOLVABILITAS ANGGARAN | 89 | ,92 | 1,32 | 1,0640 | ,10596 |
| PDRB PER KAPITA | 89 | 15.12 | 40.350 | 26.028 | 6.875 |
| RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK | 89 | 42,81 | 54,21 | 48,5257 | 2,73412 |
| KEBERLANJUTAN KEUANGAN | 89 | -204,36 | 310,06 | 63,23 | 100,16293 |
| Valid N (listwise) | 89 | | | | |

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Hasil uji statistik deskriptif mengindikasikan bahwa dari total 89 data observasi yang diteliti, diperoleh karakteristik distribusi data sebagai berikut:

- variabel kemandirian keuangan memiliki nilai minimum sebesar 2,89% dan nilai maksimum kemandirian keuangan sebesar 43,28% . Selain itu, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,1127% dengan nilai standar deviasi 7,60974% lebih kecil dari nilai *mean* menandakan bahwa data yang ada memiliki tingkat variasi yang rendah.
- Variabel solvabilitas anggaran memiliki nilai minimum senilai 0,92 dan nilai maksimumnya 1,32. Nilai rata-rata (*mean*) variabel tersebut senilai 1,06040 dengan standar deviasi senilai 0,10596 lebih kecil dari nilai *mean* sehingga data memiliki tingkat variasi yang rendah.
- Variabel PDRB per kapita memiliki nilai minimum sebesar 15,12 sedangkan nilai maksimumnya senilai 40,35. Nilai *mean* sebesar 26,03 dengan standar deviasi variabel tersebut sebesar 6,88 lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga data memiliki tingkat variasi yang rendah.
- Variabel rasio ketergantungan penduduk menunjukkan nilai minimum sebesar 42,81 sedangkan nilai maksimum variabel tersebut adalah 54,21. Selain itu, nilai rata-rata variabel rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,5113 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,74635% lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) yang menandakan tingkat variasi yang rendah.
- Variabel keberlanjutan keuangan memiliki nilai minimum sebesar negatif 204,36 sedangkan nilai maksimumnya mencapai 310.060. Rata-rata keberlanjutan keuangan

menunjukkan angka 63,23 dengan standar deviasi yang sangat besar, yaitu 100.16 menandakan bahwa variasi keberlanjutan keuangan antar daerah sangat tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 89 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 90,89015809 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,066 |
| | Positive | ,006 |
| | Negative | -.047 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,619 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,839 |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 2 uji normalitas menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang menghasilkan nilai signifikan (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,839. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | KEMANDIRIAN KEUANGAN | ,612 | 1,635 |
| | SOLVABILITAS ANGGARAN | ,772 | 1,295 |
| | PDRB PERKAPITA | ,835 | 1,197 |
| | RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK | ,573 | 1,744 |

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan hasil uji, seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,420 ^a | ,177 | ,137 | 93,02904 | 1,802 |

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 4, nilai *Durbin Watson* sebesar 1.802, nilai D_u dengan jumlah sampel sebanyak 89 dan variabel independen sejumlah empat variabel, tabel *Durbin Watson* adalah senilai 1.7493. Syarat tidak terjadinya autokorelasi adalah $D_l < D_u < 4-D_u$ sehingga dalam penelitian ini hasilnya $1,7493 < 1,802 < 2,2499$, maka disimpulkan bahwa data memenuhi syarat uji autokorelasi sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -227,757 | 125,055 | | -1,821 | ,072 |
| | KEMANDIRIAN KEUANGAN | 1,616 | ,914 | ,234 | 1,767 | ,081 |
| | SOLVABILITAS ANGGARAN | 28,039 | 58,455 | ,057 | ,480 | ,633 |
| | PDRB PER KAPITA | 1,455 | ,866 | ,190 | 1,680 | ,097 |
| | RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK | 4,514 | 2,628 | ,235 | 1,717 | ,090 |

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan tabel 5 uji heteroskedastisitas dengan metode uji glejser, gejala heterokedastisitas tidak terjadi jika nilai sig. 2 – tailed lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini, semua variabel independen memiliki nilai sig lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -565,883 | 227,886 | | -2,483 | ,015 |
| | KEMANDIRIAN KEUANGAN | 3,247 | 1,666 | ,247 | 1,948 | ,055 |
| | SOLVABILITAS ANGGARAN | 355,234 | 106,523 | ,376 | 3,335 | ,001 |
| | PDRB PER KAPITA | ,387 | 1,578 | ,027 | ,245 | ,807 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK | 4,358 | 4,790 | ,119 | ,910 | ,366 |
|----------------------------------|-------|-------|------|------|------|

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -565,883 + 3,247X_1 + 355,234X_2 + 0,387X_3 + 4,358X_4.$$

Dari persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa:

- Nilai konstanta regresi sebesar -565,883 yang berarti jika seluruh variabel independen nilainya nol, keberlanjutan keuangan daerah sebesar -565,883.
- Koefisien kemandirian keuangan sebesar 3,247 yang berarti setiap kenaikan variabel kemandirian 1 satuan maka keberlanjutan keuangan daerah akan meningkat 3,247 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Solvabilitas anggaran memiliki nilai koefisien sebesar 355,234 yang berarti setiap kenaikan variabel solvabilitas anggaran sebesar 1 satuan maka keberlanjutan keuangan meningkat senilai 355,234 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Variabel PDRB per kapita memiliki koefisien sebesar 0,387 artinya setiap kenaikan 1 satuan PDRB per kapita maka keberlanjutan keuangan meningkat sebesar 0,387 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- Rasio ketergantungan penduduk memiliki koefisien sebesar 4,358 yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan yang berarti setiap kenaikan variabel rasio ketergantungan penduduk sebesar 1 satuan maka keberlanjutan keuangan meningkat sebesar 4,358 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Determinasi

Tabel 7. Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,420 ^a | ,177 | ,137 | 93,02904 | 1,802 |

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditampilkan dalam tabel 7, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,137 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 13,7% variasi keberlanjutan keuangan. Sisanya sebesar 86,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model regresi.

Uji Signifikan Parsial (Uji T)**Tabel 8. Hasil Uji T Statistik**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|--------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -565,883 | 227,886 | | -2,483 | ,015 |
| | KK | 3,247 | 1,666 | ,247 | 1,948 | ,055* |
| | SA | 355,234 | 106,523 | ,376 | 3,335 | ,001** |
| | PDRB | ,387 | 1,578 | ,027 | ,245 | ,807 |
| | RKP | 4,358 | 4,790 | ,119 | ,910 | ,366 |
| ** Tingkat Signifikansi 10% | | | | | | |
| * Tingkat Signifikansi 5% | | | | | | |

Sumber: Data yang diolah SPSS 21 (2025)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 8, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Variabel kemandirian keuangan memiliki nilai signifikansi $0,055 < 0,1\%$. Hal ini berarti bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima.
- Variabel solvabilitas anggaran dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu hipotesis kedua diterima.
- Variabel PDRB perkapita memiliki signifikansi $0,807 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ditolak.
- Variabel rasio ketergantungan penduduk memiliki nilai signifikansi $0,366 > 0,05$ menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis keempat ditolak. Berikut ini penjelasan untuk Sub-Sub judul.

Pembahasan**Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Keberlanjutan Keuangan**

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa kemandirian keuangan memiliki berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Dalam perspektif teori neo-institusionalisme, kemandirian keuangan mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menyesuaikan diri dengan tekanan institusional, baik melalui regulasi fiskal yang mengharuskan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), maupun melalui praktik adaptif yang berkembang di lingkungan pemerintahan daerah. Isomorfisme koersif

terjadi ketika pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangannya melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memperkuat kerangka kerja bagi kemandirian keuangan daerah.

Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap sumber eskternal semakin kecil dan pendapatan daerah akan meningkat. Pendapatan daerah yang tinggi akan menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional di masa yang akan datang dan pinjaman dari sumber eskternal seperti hutang dapat dihindari sehingga tidak akan membebani keuangan untuk masa mendatang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lhutfi & Sugiharti (2023); Wardhani & Payamta (2020) yang menemukan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan daerah, namun bertentangan dengan penelitian Syahriyal dkk (2024); Bolívar et al (2014); Santis (2020).

Pengaruh Solvabilitas Anggaran Terhadap Keberlanjutan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik, solvabilitas anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan teori neo-institusionalisme, regulasi pemerintah pusat, dapat mendorong pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, dalam teori neo-institusionalisme, isomorfisme normatif menjelaskan bahwa standar profesional dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor yang berperan dalam mendorong solvabilitas anggaran yang lebih baik..

Pemerintah daerah yang memiliki solvabilitas anggaran yang tinggi akan meningkatkan keberlanjutan keuangan. Ketika suatu daerah memiliki solvabilitas anggaran yang baik, artinya daerah tersebut tidak mengalami defisit besar dan memiliki kapasitas yang cukup untuk membiayai operasional serta investasi jangka panjang tanpa harus bergantung pada utang atau bantuan eksternal yang terlalu besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syahriyal et al (2024) yang menemukan bahwa solvabilitas anggaran berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan dan bertentangan dengan hasil penelitian Puron & Garcia (2022).

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Keberlanjutan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik, PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Berdasarkan teori Neo-Institusionalisme, isomorfisme mimetik menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah yang cenderung mengikuti praktik atau strategi keuangan daerah lain tanpa mempertimbangkan faktor internal yang spesifik.

Perubahan dalam PDRB perkapita tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Hasil ini dapat diartikan bahwa meskipun PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatannya tidak serta-merta berdampak besar pada keberlanjutan keuangan daerah. Meskipun PDRB per kapita meningkat, distribusi pendapatan dalam suatu daerah bisa tidak merata. Jika pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan, perkebunan besar, atau industri yang tidak banyak berkontribusi pada pajak daerah, maka peningkatan PDRB per kapita tidak akan berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bolívar et al (2016).

Pengaruh Rasio Ketergantungan Penduduk Terhadap keberlanjutan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan statistik, rasio ketergantungan atau *dependency ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, siswa yang merupakan penduduk usia sekolah menjadi salah satu variabel kunci dalam penentuan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh sebab itu, jumlah penduduk usia sekolah yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui skema pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU).. Selain itu, adanya program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial seperti bantuan langsung tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran keluarga miskin meringankan beban penduduk produktif karena jumlah bantuan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, meskipun rasio ketergantungan tinggi, penduduk produktif tetap memiliki kemampuan membayar pajak dengan optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Santis (2020). Namun bertentangan dengan hasil penelitian Bolívar et al. (2016); Galera et al (2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan dan solvabilitas anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Sedangkan PDRB per kapita dan rasio ketergantungan penduduk tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.

Penelitian ini menggunakan variabel yang memiliki pengaruh yang rendah terhadap keberlanjutan keuangan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk

menggunakan faktor-faktor lain dengan keberlanjutan keuangan seperti efisiensi anggaran, rasio utang, maupun rasio keuangan lain yang relevan. Bagi pemerintah daerah kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat memperkuat kemandirian keuangan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperkuat solvabilitas anggaran dengan memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah serta mengurangi belanja yang tidak produktif.

DAFTAR REFERENSI

- Andriansyah, A. S., & Athoilalah, M. (2024). Analisis pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, dan jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang tahun 2012–2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(2), 552–567. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.17>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik daerah Provinsi Lampung 2023*. <https://www.lampung.bps.go.id>
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: An assessment. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2017-0328>
- Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., Citro, F., & Bisogno, M. (2019). Does financial health influence the re-election of local governments? *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(3), 345–363. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0114>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guarini, E., & Pattaro, A. F. (2019). Financial sustainability of public sector entities. In *Financial sustainability of public sector entities* (pp. 63–81). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-06037-4>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Kim, J. (2018). Collaborative leadership and financial sustainability in local government. *Local Government Studies*, 44(6), 874–893. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1512490>
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2023). Financial sustainability of local governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.17509/jaset.v14i1.48133>
- Lubis, R. F., & Saputra, P. M. A. (2016). The middle-income trap: Is there a way out for Asian countries? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(3), 273–287. <https://doi.org/10.22146/jieb.10316>

- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.
- Meyer, J., & Rowan, B. (2011). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony (I. Chirikov, Trans.). *Journal of Economic Sociology*, 12(1), 43–67. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2011-1-43-67>
- Modugno, G., & Di Carlo, F. (2019). Financial sustainability of higher education institutions: A challenge for the accounting system. In *Financial sustainability of public sector entities* (pp. 181–200). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06037-4_9
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh dana perimbangan, PDRB per kapita, tax effort, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011–2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 2011–2017. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Navarro-Galera, A., Rodríguez-Bolívar, M. P., Alcaide-Muñoz, L., & López-Subires, M. D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. *Applied Economics*, 48(41), 3961–3975. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1148260>
- Nisa, Z., & Bahari, F. (2022). Effect of regional tax, population, and GRDP on original local government revenue (PAD) in the regency/city of Central Java Province. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 90–99. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i1.2220>
- Nollenberger, K., Grobman, G. M., & Zellers, J. (2003). *Evaluating financial condition: A handbook for local government*. International City/County Management Association.
- Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar tahun 2000–2019. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.36985/v456t676>
- Pina, V., Bachiller, P., & Ripoll, L. (2020). Testing the reliability of financial sustainability: The case of Spanish local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17), 6880. <https://doi.org/10.3390/su12176880>
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis laporan keuangan Pemda*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing a measure of local government's financial condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164.
- Rodríguez-Bolívar, M. P., Navarro-Galera, A., Alcaide-Muñoz, L., & López-Subirés, M. D. (2016). Risk factors and drivers of financial sustainability in local government: An empirical study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- Rodríguez-Bolívar, M. P., Navarro-Galera, A., López-Subirés, M. D., & Alcaide-Muñoz, L. (2018). Analysing the accounting measurement of financial sustainability in local governments through political factors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(8), 2135–2164. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2754>

- Santis, S. (2020). The demographic and economic determinants of financial sustainability: An analysis of Italian local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18), 7599. <https://doi.org/10.3390/su12187599>
- Sukirno, S. (2016). *Makro ekonomi teori pengantar* (Rev. ed.). PT Rajawali Pers.
- Suwito. (2020). *Pengantar demografi*. Ediiide Infografika.
- Syahriyal, S., Abdullah, S., & Meutia, R. (2024). What determines financial sustainability in local government? Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(3), 261–274. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i3.3106>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y. S. J. (2007). Measuring financial condition: A study of U.S. states. *Public Budgeting and Finance*, 27(2), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x>
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji faktor determinan financial sustainability pada sektor pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13–27. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>